

Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)

Andy Prima Sahalata, Abdul Hamid, Dian Hikmawan

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

andyprima14@yahoo.com, abdul.hamid@fisip-untirta.ac.id, m.dianhikmawan@fisip-untirta.ac.id

Abstract: *Indonesia is a country that has a variety of cultures and religions so that the identity in his community is so very important, post-reform sentiment between groups strengthened both religious and ethnic groups, sentiment among groups is then accommodated and used by political elites as a weapon in the election in areas including in Jakarta which is a barometer of state politics. The theoretical approach used in this research is identity politics, multiculturalism and political participation. From the analysis using the theory can be concluded that the political elite and candidate head of the region, as deliberately maintain or play the identity politics, for political interests and hegemony of power. As we see in the political realities in the election of Governor of DKI Jakarta 2017 last year. With a certain identity, candidate candidates can bargain position, this shows significant ethnic and religious factors to gain support and influence the people's choice in the 2017 Governor Election Jakarta.*

Keywords: *General Election; Jakarta; Political Identity.*

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan agama sehingga identitas dalam diri masyarakatnya begitu sangat penting, pasca reformasi sentimen antar golongan semakin menguat baik golongan agama maupun golongan etnis, sentimen antar golongan tersebut kemudian diakomodir dan dipergunakan para elite politik sebagai senjata dalam pemilihan umum di daerah termasuk di Jakarta yang merupakan barometer perpolitikan negara. Pendekatan Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik identitas, multikulturalisme dan partisipasi politik. Dari hasil analisa menggunakan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa para elite politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu, untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Seperti kita lihat dalam realitas politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dengan identitas tertentu, calon kandidat bisa melakukan posisi tawar, ini menunjukkan faktor etnis dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017.

Kata kunci : Pemilihan Umum; Jakarta; Politik Identitas.

Pendahuluan

Istilah Politik Identitas telah menarik perhatian bagi para akademisi maupun pemerhati masalah sosial politik di Indonesia, bahkan mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Merujuk tulisan Muhtar Haboddin (2012), berjudul “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal” menyebutkan bahwa “menguatnya politik identitas di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan”. Dalam tulisan Muhtar Haboddin yang juga mengutip beberapa literatur ilmu politik, bahwa politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Beberapa ilmuan juga membedakan antara politik identitas dengan politik etnisitas, meskipun memiliki persamaan yang cenderung menjadikan “perbedaan” sebagai instrumen politik

Politik Identitas di Pilkada di DKI Jakarta mulai gencar digunakan semenjak tahun 2012 beberapa gambaran isu sentimen etnis dalam pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2012 ini dalam menjangkau pemilih telah diukur dalam berbagai lembaga survei.

Salah satunya exit poll yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berdasarkan suku, ras, survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting pada 20 September 2012 menemukan hanya etnis Betawi yang mayoritas memilih pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (75,1 persen), namun etnis-etnis lain sebagian besar memilih pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Etnis Jawa, 63,3 persen memilih Jokowi- Ahok. Kemudian 50,5 persen etnis Sunda juga memilih pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya ini. Paling tinggi, 92,5 persen etnis China dan 93,1 persen etnis Batak memilih Jokowi-Ahok kemudian 74,1 persen etnis Minang juga pilih Jokowi-Ahok, sementara mayoritas etnis-etnis lain (76,3 persen) juga memilih pasangan Joko Wi-Ahok., dan juga masyarakat Jakarta yang masih sentimen dengan budaya China (Tionghoa) yang belum pernah redam. Kita ketahui diskriminasi terhadap orang keturunan Tionghoa atau China di Indonesia sangatlah besar seperti yang ditulis oleh Susan Balckburn (2013) dalam bukunya “*Jakarta: Sejarah 400 Tahun*”, diskriminasi terhadap orang China (Tionghoa) pertama kali tercermin pada tahun 1740, yang mana pada saat itu pemerintahan kolonial Hindia –Belanda membunuh warga keturunan Tionghoa atau Cina sebanyak 10.000 jiwa dalam peristiwa geger pacinan. Kejadian terburuk terjadi pada tahun 1998 ketika terjadi kerusuhan pada bulan Mei tahun itu, banyak sekali warga keturunan Tionghoa di bunuh, dirampas harta bendanya, dan bahkan terjadi

pemeriksaan terhadap warga perempuan keturunan Tionghoa.

Sentimen terhadap etnis keturuna tersebut menjadi salah satu faktor politisasi identitas di pilkada DKI Jakarta tahun 2012, pada posisi ini menguntungkan posisi Fauzi Bowo yang beetnis asli betawi, walaupun pada akhirnya Jokowi Basuki dapat memenangkan pilkada 2012 efek sentimen etnis maupun agama belum memudar, FPI menjadi salah satu motor penggerak dalam menolak posisi Ahok menjadi pimpinan di DKI Jakarta, mulai dari penolakan terhadap pelantikan Ahok karena beragama Kristen sampai melantik Gubernur tandingan sebagai mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Ahok, Hal-hal seperti berikut pastilah akan membuahkan perpecahan diantara warga DKI Jakarta yang begitu majemuk dan multikultur dan efek dari Pilkada 2012 ini menjadi tambah panas di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Konflik-konflik serta isu SARA pada Pilkada 2012 telah menjadi penyebab menguatnya isu identitas di pilkada DKI Jakarta pada putaran selanjutnya yang mana Ahok kembali mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta.

Etnisitas dan Agama menjadi isu yang hangat dalam pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017 karena ada keyakinan di benak para kandidat atau tim suksesnya bahwa cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya seperti suku, agama, ras, dan golongan atau komunitas.

Metode

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Penelitian ini akan berfokus pada partisipasi politik masyarakat didalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, untuk memperoleh data yang benar dan akurat, sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, audio visual Dan wawancara. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong (2011) Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Hasil dan Diskusi

Pembentukan Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Menurut Stuart Hall, pembentukan identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari, sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas". Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness

(keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*) (Setyaningrum, 2005).

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

1. Primordialisme : Identitas diperoleh secara turun temurun seperti halnya agama maupun etnis dengan pendekatan ini aspek primordialisme dijadikan sumber utama dalam pendekatan kepada seseorang untuk menentukan pilihannya apakah orang tersebut memiliki Agama yang sama atau Etnis yang sama dengan dirinya.
2. Konstruktivisme : Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat seperti pembentukan identitas bangsa yang lahir dari proses sosial yang begitu kompleks, sehingga melahirkan identitas kolektif di dalam masyarakat, dalam pembentukan ini Identitas lahir dari penggalian dan penanaman nilai sosial di masyarakat itu sendiri seperti halnya Bhineka Tunggal Ika yang merupakan identitas kolektif bangsa dengan upaya untuk mempersatukan golongan-golongan yang ada di Indonesia baik Agama maupun Etnis nya.
3. Instrumentalisme : Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan pembentukan identitas, biasanya pembentukan identitas ini digunakan dalam pemilihan umum untuk

memposisikan calon sebagai orang yang sama dengan masyarakat luas

Gerakan pembentukan Politik Identitas di DKI Jakarta muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber sumber untuk dimobilisasi, sebelum terselenggaranya pilkada DKI Jakarta 2017 beberapa kelompok Islam seperti FPI dan GMJ memanfaatkan kondisi dari remuknya kepercayaan masyarakat muslim Jakarta terhadap Ahok karena diduga menistakan Agama islam, kelompok lawan kemudian mencoba mencari sumber sumber golongan yang mudah dimobilisasi untuk kemudian membuat perpecahan dan meraup suara pemilih yang telah di mobilisasi oleh sumber sumber tersebut. Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi bawah membuat gerakan ini kian lama kian menguat sehingga dapat memecah suara dari Ahok-Djarot.

Adapun pembentukan politik Identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai berikut:

1. Media Sosial : peran media sosial sangat berarti dalam proses pembentukan politik identitas di masyarakat DKI Jakarta, terutama masyarakat muslim yang merupakan kelompok dominan di Jakarta, hal ini didasari banyaknya konten-konten yang bernuansa SARA yang terus giat di publish untuk mempengaruhi orientasi politik masyarakat DKI Jakarta.
2. Aksi Bela Islam : Aksi bela islam yang dilakukan secara berkala ini pun memiliki pengaruh yang luar biasa, tujuan aksi ini mencoba menyatukan persepsi masyarakat muslim Jakarta

bahwa Ahok adalah musuh Islam dan haram mendukung nya.

3. Penggunaan Tempat Ibadah: penggunaan tempat Ibadah sebagai sarana kampanye tentu sangat dilarang, tempat ibadah seharusnya netral dalam urusan perpolitikan, namun disalah satu sisi tempat ibadah adalah ladang yang sangat subur untuk menanamkan buah pikir kepada masyarakat karena ceramah yang dilakukan ditempat ibadah akan bersifat dogma sehingga mengikat jemaat atau umat nya.
4. Intimidasi : kuatnya pengaruh sosial media disertai dengan dogma dalam tempat ibadah yang bernuansa sentimen terhadap golongan tertentu membuat beberapa masyarakat muslim di DKI Jakarta menganggap Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah peperangan terhadap penista Agama Islam sehingga siapapun Gubernur DKI Jakarta yang akan datang harus beragama Islam tidak boleh diluar daripada itu, hal ini membuat para pendukung pasangan Ahok yang beragama muslim di beri label sebagai pendukung dan pelindung penista Agama, mereka mengalami tekanan dan intimidasi dari masyarakat muslim di daerah nya. seperti contoh jenazah nenek hindun yang tidak dapat di sholatkan karena keluarga mendukung pasangan Ahok - Djarot.

Penggunaan Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Politik Identitas adalah suatu kajian untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi

yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011).

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis, tetapi juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkul kebinekaan bangsa ini, justru mulai tampak penggunaan identitas-identitas sektarian, baik dalam agama suku, daerah, dan lain-lain.

Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011)

Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni (Bagir, 2011).

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, tidak dapat dipungkiri kasus penistaan

agama dan penggunaan politik identitas membuat elektabilitas Ahok terjun bebas. Berawal dari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan seribu yang mengutip surat Al Maidah 51 yang kemudian potongan pernyataan itu diunggah ke Facebook oleh Buni Yani dan menjadi bola panas di media sosial, penggunaan media sosial sebagai media baru yang tidak memiliki batasan memang menjadi tidak terkendali manakala dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan politik dan kampanye.

Unggahan di Facebook itupun menjadi ramai dan dijadikan entry point bagi lawan lawan politik Ahok untuk melancarkan serangan terhadap Ahok yang popularitasnya tidak terbendung. Pascapernyataan Ahok itu, berbagai elemen masyarakat yang didominasi oleh ormas-ormas Islam termasuk FPI yang sejak awal anti-Ahok mulai bergerak dan melakukan aksi berjilid secara sistematis yang tujuannya adalah memenjarakan Basuki karena dianggap sebagai penista agama.

Lebih dari itu, kelompok massa juga meneriakkan pemilih muslim wajib memilih pemimpin muslim hal ini didukung pula oleh Fatwa MUI yang menyuarakan haram memilih pemimpin Kafir (non-muslim), isu identitas tersebut ditujukan untuk menyerang Ahok, Ahok yang notabene keturunan Tionghoa dan beragama Kristen kemudian dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak layak dipilih oleh umat muslim di ibu kota. Isu SARA dan politik Identitas terus dimainkan, dunia maya dipenuhi dengan cyber army yang membentuk opini dan ditambah dengan masuknya mesin politik kelompok Islam yang menjadi lawan Ahok ke masjid dan

mushala dengan khotbah bahwa haram hukumnya untuk memilih pemimpin nonmuslim.

Masyarakat ibu kota pun terpolarisasi dan terpecah menjadi dua kubu yang berlawanan dan rawan terjadinya konflik, hal ini terjadi oleh alm. nenek hindun di Jakarta Selatan yang tidak bisa di sholatkan di masjid dekat rumahnya karena beliau dan keluarganya mendukung pasangan Ahok-Djarot yang tidak sesuai dengan ajaran atau ajakan dari masyarakat sekitarnya untuk tidak memilih pemimpin non-muslim.

Penggunaan Identitas sebagai senjata dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah terbukti lumayan ampuh dalam menggoyang pasangan calon lain yang tidak memiliki persamaan Identitas dengan masyarakat dominan Jakarta dan mobilisasi masa yang begitu sangat kuat dilakukan oleh aktor politik dan tim sukses kemenangan calon yang mengarahkan partisipasi politik individu untuk berorientasi terhadap identitas calon yang akan dipilih dibandingkan program dan gagasan yang ditawarkan, penggunaan dua isu sentimen identitas tersebut adalah sebagai berikut.

Sentimen Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017

Sentimen etnis seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika dalam arena demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena

politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik struktur politik pada level lokal atau daerah (Marzuki, 2010).

Dalam pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat 3 pasangan calon yang beragam etnis pasangan pertama Agus-Sylvi, Agus memiliki etnis Jawa dan Sylvi etnis Betawi, kedua Ahok-Djarot, Ahok beretnis Cina (Tionghoa) dan Djarot beretnis Jawa dan yang ketiga Anies-Sandi, Anies beretnis Jawa dan Sandi beretnis Padang. Dari ketiga pasangan calon yang terdapat salah satu pasangan calon yang beretnis Betawi yakni Sylviana yang menjadi calon wakil gubernur bersama Agus Harimurti Yudhoyono, walaupun Sylviana merupakan Etnis Betawi nyatanya etnis Betawi yang dimiliki Sylviana tidak terlalu kuat untuk mengambil simpati pemilih di DKI Jakarta, ini dibuktikan bahwa Agus-Sylvi hanya mengantongi suara sebanyak 17,05 persen (KPUD DKI Jakarta) yang membuatnya menduduki peringkat terakhir dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

Yang menjadi perhatian utama dalam sentimen etnis di Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah sentimen pribumi dan non-pribumi (orang keturunan bangsa asing), pembentukan identitas pribumi dapat dilihat melalui teori pembentukan identitas oleh Stuart Hall melalui pendekatan Konstruktivisme yang memandang identitas sebagai suatu hasil

dari proses sosial yang kompleks yang terbentuk dari ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan pengalaman masa lampau (dalam Widayanti, 2009) melalui pendekatan ini para elite politik di DKI Jakarta mencoba memobilisasinya menjadi kekuatan politik dalam Pilkada.

FPI Dan Politisasi Etnis Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu aktor penting dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, FPI selalu aktif menyuarakan mengenai penolakan terhadap Basuki dari tahun 2012, pada tahun tersebut FPI belum mampu memobilisasi masa yang sangat besar karena masyarakat Muslim Jakarta tidak menganggap Basuki sebagai musuh umat Islam, FPI baru mampu memasifkan massa ketika Basuki terdinkasi kasus penistaan agama, pada saat momentum tersebut FPI mengambil peran penting untuk menyatukan persepsi masyarakat Muslim Jakarta bahwa Basuki adalah musuh bersama umat Islam (common enemy) dengan memanfaatkan kondisi yang sedang kacau akibat pidato Basuki tersebut.

Pasca pidato Ahok sentimen terhadap etnis golongan keturunan Cina meningkat dan masuk dalam 5 besar golongan yang tidak disukai warga DKI Jakarta seperti yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2016. Sehingga aksi penolakan Ahok yang dimotori oleh Front Pembela Islam dapat memobilisasi massa aksi yang sangat besar pada 2 Desember 2016, slogan "ganyang Cina" menjadi bukti belum mudarnya sentimen antar etnis di DKI Jakarta.

Hal ini terjadi karena Identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas, dari pernyataan tersebut maka ketika identitas di formulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (Keberbedaan) (widayanti, 2009) pada contoh ini FPI berhasil membuat kesadaran kolektif akan bahayanya etnis China di Jakarta sehingga masyarakat muslim DKI Jakarta membenci dan menjauhi golongan etnis Cina.

Bila dilihat dari serangkaian kampanye dan aksi tersebut tim sukses ataupun golongan tertentu mencoba memobilisasi masa dengan melempar keresahan ke masyarakat dengan ancaman Keturunan etnis China (tionghoa) yang bukan asli pribumi Indonesia dapat menguasai Indonesia dengan cara merebut DKI Jakarta terlebih dahulu yang nanti akan menyengsarakan penduduk asli Indonesia yang ada di DKI Jakarta, Huntington dan Nelson (dalam Hamid, 2017) mengartikan pola seperti ini sebagai partisipasi politik mobilisasi yang melempar argumentasi guna mengajak, menganjurkan atau bahkan memaksa masa untuk mengikuti arah politiknya dan bisa jadi kesadaran kolektif yang timbul akibat termobilisasi tersebut, dapat pula menjadikan individu menjadi partisipan otonom yang sudah yakin dengan isu tersebut.

Kuatnya mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim sukses maupun kampanye penolakan terhadap Etnis Cina oleh Front Pembela Islam (FPI) membuat suara Basuki di Pilkada DKI Jakarta 2017

tidak ada peningkatan sama sekali dari putaran satu ke putaran kedua.

“isu etnis cina memang terasa sekali ya, apalagi di daerah Ciracas ini, banyak banget selebaran yang hasut orang buat jangan milih Ahok karena dia Cina lah, antek pki lah, kafir lah pokoknya segala yang jelek pasti Ahok kena (wawancara dengan Richad Fernando salah satu tim sukses Basuki – Djarot pada tanggal 20 Juni 2018)”.

Sentimen etnis acap kali menjadi komoditas politik dan dipakai saat memilih para calon gubernur. Isu etnis untuk sementara diperlukan untuk mendulang suara, bila ini dilakukan, justru akan memberikan pendidikan politik buruk bagi masyarakat. Isu etnis yang digulirkan ini sebetulnya bukan secara langsung dari publik, tapi digulirkan oleh elit-elit politik. Konstruksi elit ini kemudian diartikan oleh konsultan-konsultan politik di belakang para cagub ini.

Sentimen Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017

Sentimen agama merupakan perilaku manusia, khususnya umat beragama (yang diwujudkan melalui kata, tindakan, kebijakan, keputusan) yang merendahkan, membatasi, dan meremehkan golongan agama lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya, agar orang yang berbeda agama tersebut tidak mendapatkan hak-haknya serta tidak mampu mengaktualisasi dirinya secara utuh (Munir, 2018).

Pada umumnya, faktor utama yang menunjang sentimen Agama adalah dorongan dorongan dari pihak luar

kepada seseorang. Pihak luar yang dimaksud antara lain, para tokoh-tokoh atau pemimpin Agama, politik, penguasa, pengusaha, pemerintah, kepala suku. Mereka adalah orang-orang yang ingin meraih keuntungan dari suatu perbedaan. Bagi mereka, perbedaan merupakan suatu kesalahan dan ketimpangan sosial, sehingga perlu diperbaiki melalui pemurnian dengan cara menghilangkan atau menghancurkan semua hal yang berbeda.

Menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 sentimen Agama meningkat cukup tajam, seperti survei yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada saat sebelum dan sesudah aksi 212 terhadap pengaruh agama dalam pilkada DKI Jakarta 2017, hasilnya pada bulan maret dan oktober tahun 2016, yang masing-masing 40 dan 55 persen responden menganggap sentimen agama sangat penting, dan pasca aksi 212 LSI mencatat sentimen agama warga Jakarta meningkat mencapai 71,4 persen.

Meningkatnya isu sentimen Agama di Pilkada DKI Jakarta tak lepas dari pengaruh pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menjadi alasan umat muslim untuk bergerak menjatuhkan Ahok, sebelum aksi 212 maupun aksi sebelumnya 411, surat Al-Maidah ayat 51 tidak terlalu berpengaruh dalam popularitas Ahok di DKI Jakarta hal ini terlihat dari berbagai aksi penolakan dirinya dari tahun 2012-2014 tidak menimbulkan dampak yang signifikan, barulah ketika Ahok mempergunakan surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka dampak yang besar terjadi dan menurunkan kepercayaan umat muslim terhadap Ahok.

Tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa sentimen Agama adalah hal yang menakutkan pada situasi dan lingkungan pergaulan sosial, hubungan antar umat agama, pengangkatan dan pemilihan pemimpin, khususnya dalam pemilihan Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017.

Masjid : Politisasi Agama Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Politisasi Agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, Indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian, dilakukan tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik, menurut Agnes Heller gerakan politik identitas baik didalamnya politisasi etnis maupun politisasi agama semuanya di dasari oleh satu fokus perhatian utama yaitu *difference* (perbedaan) (dalam Ubed, Abdillah 2002).

Dengan memanfaatkan kondisi sentimen Agama yang sedang menguat pada akhir tahun 2016 para elite partai politik maupun tim sukses para pasangan calon berlomba menggunakan nya menjadi sebuah instrumen kekuatan seperti yang dikatan oleh Stuart Hall dengan pendekatan instrumentalisme dalam gerakan politik identitas bahwa Identitas dipergunakan dan dikonstruksikan untuk kepentingan elite guna meraih kekuasaan (dalam Widayanti, 2009).

Penggunaan Sentimen Agama sebagai kekuatan politik dilakukan melalui beberapa cara seperti pemasangan poster, spanduk bahkan sampai ceramah di tempat ibadah, tempat ibadah seperti masjid dinilai menjadi bangunan gerakan politik yang ampuh karena sifat dogma yang terkandung dalam setiap ceramah di masjid dapat mempermudah memobilisasi massa sehingga para elite politik tidak harus bersusah payah untuk membentuk instrumen kekuatan dalam pemilihan umum, cara ini lebih praktis dan ampuh dibandingkan dengan melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan proses kampanye konvensional berupa kampanye di media sosial, spanduk ataupun orasi politik.

Masjid digunakan sebagai bangunan politik sudah pernah diterapkan oleh partai FIS di Aljazair menggunakan masjid sebagai tempat menggaungkan seruan politik untuk meraih suara dalam pemilihan umum, di Indonesia sendiri Masjid juga menjadi bangunan politik yang sangat berpengaruh seperti tulisan Muhhamad Afdillah (2016) dalam bukunya yang berjudul "Dari Masjid Ke Panggung Politik" menjelaskan bagaimana kyai tajul mampu membangun basis kelompok syiah di sampang, Jawa Timur dengan sangat pesat, kyai tajul menggunakan masjid sebagai media dakwah sosialnya untuk meyakini masyarakat sampang bahwa ajaran syiah yang diajarkan olehnya adalah ajaran yang benar, hal ini berdampak pada separuhnya masjid-masjid kelompok sunni akibat para santrinya pergi untuk ibadah ke masjid-masjid yang dipimpin kyai tajul, konflik syiah dan sunni di sampang menunjukkan mobilisasi yang dilakukan di

dalam masjid sangatlah ampuh dan memiliki dampak yang besar.

Dalam Pilkada DKI Jakarta Masjid menjadi tempat yang subur untuk menanamkan sentimen agama sebagai alat pemersatu jemaat atau umatnya, dapat dilihat beberapa pasangan calon dan tim suksesnya mencoba meraup suara dari dalam masjid diantaranya seperti Amien Rais, Prabowo dan Anies yang menggunakan masjid Al-Azhar sebagai bangunan politik untuk meraih simpati masyarakat muslim DKI Jakarta, para elite politik dan calon Gubernur tersebut mengadakan acara gerakan shalat subuh berjamaah di masjid Al-Azhar pada tanggal 15 Januari 2017 Tema yang diangkat pada acara ini adalah "Tabaligh Akbar Politik Islam: Berbeda dalam Mazhab Bersatu Dalam Politik" secara keseluruhan acara dalam kegiatan tersebut mencoba menyatukan umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-muslim, acara inipun mendapat sanksi dari Bawaslu DKI Jakarta berdasarkan nomor registrasi 026/LP/Prov-DKI/I/2017. (Dokumen Bawaslu DKI Jakarta) karena diduga melakukan kampanye bernuansa SARA dalam lingkungan tempat ibadah yang seharusnya bersih dari kampanye politik seperti yang tertera dalam PKPU 12 Tahun 2016 yang merupakan perubahan PKPU 7 Tahun 2015 Pasal 66 ayat 1 huruf j yang berisi tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan institusi pendidikan.

Kampanye di lingkungan masjid juga dilakukan oleh pasangan Agus -Slyvi, pasangan tersebut melakukan peresmian dan ceramah yang bernuansa politik di Masjid Nurul Ikhsan Grogol, Jakarta Barat di tanggal 15 Januari 2017 dalam kedatangannya di masjid tersebut Agus

menjanjikan kepada warga Jakarta untuk memberikan dana 1 miliar untuk satu RW agar pertumbuhan ekonomi masyarakat DKI Jakarta bisa cepat bertumbuh, Agus juga menghimbau agar masyarakat muslim bersatu. (<https://kumparan.com/@kumparannews/agus-resmikan-masjid-di-jelambar-sambil-kampanye> diakses pada tanggal 13 Juli 2018).

Berbeda dengan dua pasangan tersebut posisi yang tidak menguntungkan dialami oleh pasangan Basuki – Djarot, pasangan ini juga ingin mengambil simpati publik dari dalam masjid namun sentimen Agama akibat kasus penistaan yang dilakukan oleh Basuki menjadikan pasangan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai masjid yang ada seperti Masjid Al-Inayah Kali Deres, Jakarta Barat, Masjid Nurul Falah Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan Masjid AT-Taqwa Kapuk Muara, Jakarta Utara. (<https://www.nahimunkar.org/usa-i-kalideres-dan-grogol-kedatangan-ahok-penjarangan-ditolak-warga-dki/> diakses pada 13 Juli 2018).

Masjid merupakan tempat mobilisasi massa yang penting di dalam Pilkada DKI Jakarta 2018 mengingat 83,30 persen penduduk DKI Jakarta beragama Islam (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tahun 2014) peran masjid menjadi sangat disoroti karena memberikan efek yang luar biasa apalagi pada momentum Pilkada 2017 sentimen Agama menjadi isu yang laris, hampir disemua masjid di Jakarta selalu membicarakan nya.

“...Maaf ini ya, saya rasa masyarakat Jakarta tidak pintar, hemm, ya karena gampang termakan hasutan orang untuk milih berdasarkan

agama nya, ini seperti yang dilakukan oleh masjid di UI sana depan pas gedung kita, engga tau sengaja atau apa selalu saja tiap shalat jumat, cermahin nya soal haram memilih pemimpin kafir melulu...” (Wawancara dengan Muhammad Douglas selaku kasubag teknis pemilu KPUD DKI Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018)

Huntington dan Nelson (dalam Hamid, 2017) menilai pola seperti tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi politik mobilisasi yaitu dengan dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau bahkan pemaksaan dengan bentuk non-konvensional dilakukan melalui saluran tidak resmi, tekanan yang dimaksudkan dalam proses mobilisasi tersebut dapat dilihat dari bentuk Intimidasi di Jakarta selatan terjadi penolakan untuk menyolatkan jenazah nenek hindun pada maret 2016 dikarenakan keluarga nenek hindun mendukung pasangan Ahok-Djarot yang memiliki Identitas berbeda, keluarga nenek hindun dipaksa untuk mendukung pasangan yang seiman dengan nya baru jenazah akan di Sholatkan.

“Ya saya juga dengar persoalan mengenai nenek hindun itu, hemm menurut saya masyarakat Jakarta harus bisa menghargai pilihan orang lain tanpa harus mengintimidasi sejauh itu, itu sih sudah keterlaluan...” (wawancara oleh Muhammad Jufri Komisioner Bawaslu DKI Jakarta pada 5 Juni 2018).

Agama merupakan sesuatu yang fundamental dalam masyarakat. Agama selalu ada di dalam tubuh masyarakat. Kekuatan di dalam agama itu mengalahkan kekuatan yang lainnya. Bayangkan saja, banyak perang yang membunuh orang serta kejahatan-

kejahatan lainnya atas dasar agama. Agama tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Seperti apa yang diungkapkan Geertz (dalam Puspitasari, Elis, 2010) bahwa adanya pengaruh agama dalam setiap pojok kehidupan masyarakat Indonesia. Pendapat ini membuktikan bahwa agama tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama sering kali dibawa oleh para aktor politik untuk melegitimasi kekuasaannya sehingga terkesan mempolitisir agama.

Politik Identitas Ancaman Bagi Multikulturalisme DKI Jakarta

Maraknya penggunaan Politisasi etnis maupun agama yang memanfaatkan faktor sentimen yang timbul di masyarakat merupakan ancaman yang serius bagi Multikulturalisme di DKI Jakarta, Will Kymlicka (2002) menjelaskan bahwa Multikulturalisme adalah sebuah gagasan atau pandangan yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan untuk menjamin keadilan antar kelompok. Namun dalam praktek Pilkada DKI Jakarta 2017 sentimen etnis dan agama terbukti berhasil di pakai sebagai senjata ampuh memenangkan pilkada DKI Jakarta.

Salah satu bukti pemakaian sentimen etnis berhasil di Pilkada DKI Jakarta dapat dilihat dari isi pidato kemenangan Anies – Sandi yang berisi :

"Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta... Dulu semua kita

pribumi dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. 'etek se atellor ajam se ngeremme', itik yang bertelur ayam yang mengerami, kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini" (Detik.com)

Dalam pidatonya tersebut Anies mengungkapkan dua kata penting yakni Kolonialisme dan Pribumi penggunaan dua kata tersebut dapat disebutkan sebagai penggunaan "*dog-whistle politics*", ketika sebuah pesan politik menggunakan bahasa berkode yang tampaknya berarti satu hal bagi satu kelompok masyarakat, namun memiliki makna berbeda dan lebih spesifik pada kelompok tertentu dalam hal ini dapat dilihat Anies berpendapat bahwa dirinya berhasil merebut Jakarta dari tangan asing, isi pidato tersebut yang menganalogikan etnis keturunan China (tionghoa) adalah penjajah (kolonialisme) dan bukan warga asli negara Indonesia (pribumi) dapat mengancam multikulturalisme Indonesia, karena menganggap ketidak bolehan warga negara keturunan asing untuk memimpin di kursi pemerintahan, Will Kymlicka (2002) berpendapat multikulturalisme dapat berjalan dengan baik jika negara dapat menjamin hak minoritas untuk menjadi bagian dari kursi pemerintahan untuk mengikutsertakan representasi dari kelompoknya (*Special Representation Rights*) sebab negara harus menjamin keadilan antar kelompok.

Representasi kelompok seperti yang disebutkan oleh Kymlicka menjadi sangat

penting di Indonesia karena dengan begitu negara memberikan penghargaan kepada masyarakatnya minoritas dan menghargai hak nya untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya di ranah politik, namun yang terjadi di dalam Pilkada DKI Jakarta sebaliknya terdapat penyekatan atau pembatasan hak minoritas dalam perpolitikan daerah, dengan mengatakan bahwa kaum muslim hanya wajib memilih pemimpin muslim, maka secara tidak langsung masyarakat non-muslim merasa telah dilucuti hak politik nya untuk menjadi seorang pemimpin karena masyarakat DKI Jakarta mayoritas adalah muslim, jika mayoritas masyarakat muslim jakarta menyuarakan "haram" untuk memilih pemimpin non-muslim, maka otomatis masyarakat non-muslim tidak akan pernah mendapatkan posisi sebagai pemimpin.

Charles Taylor (dalam madung, 2012) mengatakan, dalam multikulturalisme pembentukan identitas individu maupun kelompok separuhnya terbentuk dari rekognisi (pengakuan) atau tidak adanya rekognisi, bahkan sering juga lewat pengakuan yang keliru dari sesama, sehingga menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok, tidak adanya pengakuan dan memberikan gambaran yang salah terhadap individu maupun kelompok dapat menyebabkan pelecehan, pengekangan bahkan penindasan terhadap individu maupun kelompok tersebut. Pelecehan, pengekangan, dan penindasan terhadap individu atau kelompok tertentu dapat dipandang sebagai bentuk represi dari budaya mayoritas, pelecehan pengekangan dan penindasan yang dilakukan menyebabkan subjek yang bersangkutan meng-

internalisasi perasaan rendah diri serta mengungkapkan kembali lewat perilakunya.

Bila melihat dari keadaan Indonesia saat ini dimensi rekognisi tidak bertumbuh dengan baik karena masih adanya penggambaran yang salah akan individu atau kelompok tertentu, mengingat Indonesia sendiri terdiri dari begitu banyak golongan etnis maupun agama, sehingga menyebabkan adanya ketegangan antara hak-hak kolektif yang menimbulkan konflik di masyarakat, seperti kasus kerusuhan Agama di Ambon, Sulawesi Utara antara golongan Islam dan Kristen yang terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan kerusakan dan korban yang begitu besar, kasus pembakaran Gereja di Singkil, Aceh terjadi karena penduduk Islam di Singkil menaruh rasa curiga kepada golongan Kristen, kelompok golongan Kristen diduga akan melakukan kristenisasi di Aceh, dan juga kasus tragedi Sampit di Kalimantan Tengah antara Etnis dayak dengan Etnis Madura terjadi karena ketidaksukaan etnis asli kalimantan yaitu Dayak atas kesuksesan etnis pendatang Madura yang berakhir pada konflik pembunuhan.

Kasus-kasus tersebut menandakan upaya rekognisi terhadap etnis dan agama di Indonesia masih sangat jauh untuk berkembang karakteristik kewarganegaraan yang memiliki salah satu tujuan yaitu memberikan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama warganegara yang pluralistik baik suku, agama, ras, bahasa, ideologi politik (Ananda, 2012) gagal untuk di praktekkan di Indonesia sehingga kelompok minoritas yang mendapatkan represi dari golongan mayoritas

cenderung akan merendahkan dirinya dan tidak berani mengaktualisasikan dirinya sebagai representatif kelompoknya, sehingga proses perjuangan untuk pengakuan dianggap membahayakan.

Begitu juga yang terjadi dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 ketegangan antar etnis maupun agama membuat dimensi rekognisi di Jakarta tidak berkembang dengan baik seperti contoh kasus penjarahan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Etnis keturunan China yang dianggap sebagai penjajah menandakan ada kekeliruan dalam penggambaran subjek. Situasi tidak berkembangnya rekognisi di Jakarta membuat masyarakat muslim Jakarta mudah untuk di mobilisasi dengan contoh aksi 4 november 2016 dan 2 desember 2016 yang menyuarakan anti cina dan anti kafir (kelompok non-muslim) sehingga dapat disimpulkan kurang bertumbuhnya dimensi rekognisi di Jakarta membuat Politisasi Identitas di Pilkada DKI Jakarta dapat di pergunakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya pengakuan dan penggambaran yang salah akan kelompok tertentu yang memudahkan para elite politik untuk langsung memobilisasinya dengan melempar isu semtimen identitas sebagai instrumen kekuatan dalam Pilkada DKI Jakarta.

Charles Taylor (dalam, madung 2012) menjelaskan wacana inti dari multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (*Struggle For Recognition*) teori ini muncul atas analisa gerakan kelompok minoritas pada abad ke 20 baik dalam hal agama maupun etnis, *Struggle For Recognition* dapat juga diartikan sebagai perjuangan untuk melindungi dan mempertahankan

identitas kelompok atau individu yang memiliki keunikan tersendiri baik ajaran maupun perbuatan, dalam penjelasan diatas kaum mayoritas merasa terancam dengan kehadiran minoritas karena dianggap bisa melunturkan atau menggantikan posisi kelompok mayoritas, timbulnya persepsi buruk tersebut membuat mayoritas melakukan tindakan represi yang bisa berujung pada konflik.

Ketegangan antar Etnis maupun Agama di Indonesia sesungguhnya dapat teratasi bila setiap Etnis maupun Agama mau membangun dimensi rekognisi antar golongan yang berbeda, hal ini diupayakan sebagai salah satu contoh bentuk penyelesaian ketegangan antar masyarakat multikultur dengan mengedepankan pengakuan dan dialog antar golongan, rekognisi penting dalam relasi kewarganegaraan dalam memenuhi haknya karena jika rekognisi dapat berjalan dengan baik tidak ada hambatan bagi golongan minoritas yang juga merupakan warga negara untuk memenuhi haknya seperti hak politik maupun hak ekonomi. Namun dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 proses rekognisi yang seharusnya berjalan dengan baik guna sebagai salah satu syarat untuk mencapai pemenuhan hak warga negara tidak berjalan dengan mulus, karena tidak ada pengakuan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di tambah lagi dengan politisasi identitas yang tumbuh subur dalam Pilkada menyulitkan golongan minoritas untuk mendapatkan haknya terutama hak politik.

Sehingga realitas yang tumbuh di masyarakat DKI Jakarta lebih mengedepankan faktor Identitas pasangan calon dibandingkan dengan adu

gagasan para pasangan calon, orientasi pemilih di DKI Jakarta akan lebih tertuju pada kecenderungan memilih pemimpin sesuai identitas yang dimilikinya baik identitas etnis maupun identitas agama, faktor tersebut lahir karena kegagalan dalam proses rekognisi golongan di Jakarta, sehingga prasangka buruk selalu muncul kepada setiap golongan yang ada, terlebih dalam pertarungan antara Agus, Anies dan Basuki. Banyak umat muslim di Jakarta cenderung menganggap Basuki adalah ancaman bagi islam, walaupun tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Basuki selama memimpin Jakarta besar yakni 72,2 persen (survei litbang Kompas tahun 2017) nyatanya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan suara Basuki, banyak masyarakat muslim yang sudah terlanjur menganggap Basuki adalah ancaman dan lebih memilih pasangan agus ataupun anies karena memiliki identitas golongan yang sama.

Jika elite politik di Jakarta menggunakan isu sentimen Agama dan Etnis sebagai senjata dalam meraih suara, maka bukannya tidak mungkin daerah lain akan mengikuti cara tersebut, yang mana hal tersebut sangat berbahaya bagi kedamaian dan keutuhan negara . Model mobilisasi politik yang mengeksploitasi agama dan etnis akan merambat dengan sangat cepat, apalagi di daerah-daerah yang sentimen keagamaann dan etnisnya masih sangat kuat seperti Ambon, Maluku, Aceh, Papua dan lain sebagainya. Agama dan Etnis hanyalah sebuah atribut, dia bukan substansi.

Kesimpulan

Kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Kepala

Daerah DKI Jakarta 2017 menjadi bukti berhasilnya Identitas menjadi basis kekuatan penting. Politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam proses pemilihan kepala daerah karena dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa. Politik identitas berangkat dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan) dua faktor ini dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

Merebaknya sentimen politik identitas di ranah publik dalam perhelatan demokrasi seperti pilkada DKI Jakarta merupakan ulah dari sekelompok elite. Baik itu elite partai politik yang haus akan kekuasaan maupun pemimpin organisasi massa yang selama ini merasa terpinggirkan, mereka saling berkepentingan lalu memanfaatkan sentimen tersebut untuk melempengkan jalan masing-masing.

Kajian ini menjadi menarik mengingat Jakarta merupakan Ibu Kota Negara yang menjadi barometer bagi daerah lain nya di Indonesia, Politisasi identitas sebagai agenda politik utama dalam pemilihan umum daerah yang terjadi di Jakarta bisa saja akan ditiru oleh elite politik daerah lain nya yang daerahnya masih sangat kuat sentimen identitasnya seperti Aceh, Ambon, maupun Papua. Hal ini berdampak akan mundurnya demokrasi di Indonesia karena orientasi pemilih akan beralih kepada kesamaan Identitas, dan bukan tak mungkin jika hal ini berlanjut akan terjadi konflik di sekala daerah maupun nasional karena kelompok minoritas yang juga warganegara terlucuti hak politiknya karena tidak dapat

merepresentasikan kelompok nya dalam lingkup pemerintahan maupun tidak adanya kesempatan untuk menjadi pemimpin selama sentimen identitas di jadikan agenda politik utama dalam pemilihan umum.

Dimensi rekognisi yang tidak mengalami pertumbuhan merupakan alasan mengapa politik identitas menjadi sangat tumbuh pesat dalam pemilihan umum, selama tidak adanya rekognisi antar golongan politisasi identitas menjadi bahaya laten yang dapat merusak multikulturalisme Indonesia. Inilah yang menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah, partai politik maupun masyarakat untuk dapat mengembangkan dimensi rekognisi melalui dialog antar golongan, agar politisasi identitas tidak dapat tumbuh di masyarakat dan menjaga keutuhan perstuan bangsa.

Referensi

- Abdillah, Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesia Tera.
- Afillah, Muhammad. (2016). *Dari Masjid Ke Panggung Politik : Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur*. Penerbit CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.
- Amri, Arfi. (2012). *Exit Poll Pemilih Foke Dan Jokowi Berdasarkan Etnis* Diakses melalui <http://metro.news.viva.co.id/exit-poll-pemilih-foke-dan-jokowi-berdasar-etnis> pada hari Senin, 9 Juli 2018 Pikul 15:20 WIB
- Ardhana, Ketut. (2011). *Etnisitas dan Identitas: Integrasi Etnis dan Identitas dalam Terwujudnya Masyarakat Multibudaya di Bali, dalam Masyarakat Multikultural Bali: Tinjauan Sejarah, Migrasi, dan Integrasi*. Denpasar: Larasan dan Faksas.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung Rineka Cipta
- Bagir, Zainal Abidin. (2011). *Pluralisme Kewarganegaraan, Arah Baru Politik Keragaman Di Indonesia*. Bandung-Yogyakarta : Mizan dan CRCS
- Blackburn, Susan. (2013). *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Komunitas Bambu
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Data KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) DKI Jakarta.
- Data BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta
- Data BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) DKI Jakarta
- Fikri, Adrian. (2013) *Identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah 2012*. UIN Jakarta
- Haboddin, Muhtar. (2012). *Menguatnya Politik Identitas Diranah Lokal*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan UMY
- Hamid, Abdul (2017). *Studi Ilmu Politik*. Sebuah Pengantar. Serang: Untirta Press.
- _____. 2014. *Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election* in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 85-109.
- Ismail, Taufik (2017). *Dianggap Lingkungan Masjid, Panitia Kumpara (2017) "Agus Resmikan Masjid di Jelambar Sambil Kampanye"* Diakses melalui <https://kumparan.com/@kumparannews/agus-resmikan-masjid-di-jelambar-sambil-kampanye> pada hari Jumat, 13 Juli 2018 Pukul 09:10 WIB
- Kymlicka, Will. (2002). *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. LP3ES

- Madung, Otto. (2012). *Politik Diferensiasi : Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
- Marzuki, Muhammad. (2010). *Perspektif Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota Dprd Pada Wilayah Multi Etnik*. Jurnal Academica Fisip Untad Vol.2 No.2
- Miichi, Ken. (2014). *The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election*, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33, 1, 55 – 83.
- Munir, Asep. (2018). *Agama, Politik Dan Fundamentalisme*. Jurnal For Islamic Studies vol.1
- Moleong, Lexy. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nahimunkar. (2016). *Usai di Kalideres dan Grogol, Kedatangan Ahok ke Penjaringan Juga Ditolak Warga DKI* Diakses melalui <https://www.nahimunkar.org/usai-kalideres-dan-grogol-kedatangan-ahok-penjaringan-ditolak-warga-dki/> pada hari Jumat, 13 Juli 2018 Pukul 09:30 WIB
- Puspitasari, Elis. (2010). *Politisasi Agama: Kajian Tentang Politisasi Agama oleh Para Caleg pada Pemilu Legislatif 2009 di Banyumas*.
- Republika (2015). *MUI : Muslim Jangan Pilih Pemimpin Non-Muslim*. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/03/21/n2siql-mui-muslim-jangan-memilih-pemimpin-nonmuslim> pada hari Sabtu, 7 Juli 2018 Pukul 19:00 WIB
- Setyaningrum, Arie. (2005). *Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial*. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005 hal 19
- Sofianto, Arif. (2007) *Stanford Encyclopedia of Philosophy, The Role of Religion in Voters' Preference During General Election 2014 in Central Java*.
- Tempo. (2017). *Survei Pilkada, Sentimen Agama Meningkatkan di Jakarta*. Diakses melalui <https://fokus.tempo.co/read/1001145/survei-pilkada-sentimen-agama-meningkat-di-jakarta> pada hari Senin, 9 Juli 2018 Pukul 16:00 WIB
- Widayanti, Titik. (2009). *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM. Yogyakarta.